

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan dikeluarkannya undang-undang (UU) No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan era baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan

DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam waktu satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Transparansi atau keterbukaan yang sangat diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem ekonomi pemerintah yang mampu menyediakan informasi untuk tujuan pertanggungjawaban (*stewardship and accountability*), mengontrol dan pengawasan atau pengendalian manajemen pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi sangat penting karena akuntabilitas merupakan salah satu elemen manajemen keuangan pemerintah untuk mengontrol kebijakan pengelolaan keuangan, disamping konsep *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Selain satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yang

diharapkan akan memberikan informasi yang lebih rinci atas hasil interpretasi mengenai prestasi yang dicapai dan keadaan keuangan daerah. Analisis rasio keuangan sebagai sumber informasi keuangan sangat bermanfaat apabila angka-angka rasio daerah tersebut dibandingkan dari tahun ke tahun, dengan membandingkan angka rasio untuk beberapa periode akan dapat mengetahui semakin efisien tidaknya dalam mengelola keuangan daerah.

Permendagri no 59 tahun 2007 perubahan atas Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu pada bagian pendapatan asli daerah. Perubahan yang terjadi adalah pada klasifikasinya. Jika pada bentuk sebelumnya pendapatan dari daerah dibagi menjadi empat yaitu sisa lebih perhitungan tahun lalu, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak atau bukan pajak, sumbangan dan bantuan menjadi satu bagian. Dengan diberlakukannya permendagri no 59 tahun 2007, pendapatan asli daerah di klasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaandaerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PP no 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, peaturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Standar Akuntansi Pemerintah dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan Keuangan

Penerimaan daerah pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tidak berbeda jauh dengan pemerintah daerah kabupaten lain dimana pendapatannya mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap tidak terlepas dari pendapatan asli daerah sendiri dan dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan yang berasal dari industri dan perusahaan milik daerah sendiri. Selain itu pendapatan di Kabupaten Cilacap juga berasal dari pertanian, pariwisata, kehutanan dan industri, dimana pendapatan tersebut banyak menghasilkan pemasukan bagi keuangan daerah di Kabupaten Cilacap tiap tahunnya.

Setyawan (2002) melakukan penelitian dengan judul: "Pengukuran Kinerja Anggaran Dewan Kota Malang Dilihat Dari Perspektif Akuntabilitas Untuk Periode 1997/1998-2001". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah Kota Malang belum dikatakan baik, karena ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat masih tinggi, belum tercapainya target penerimaan PAD, terpusatnya dana APBD pada belanja rutin, dan pendapatan yang cenderung menurun, sedangkan kebutuhan belanja semakin naik. Hal ini dapat dilihat dari rasio kemndirian yang masih rendah, meskipun secara umum kinerja keuangan pemerintah daerah sudah efektif dan efisien. Apabila dilihat dari rasio pertumbuhan kinerja pemerintah relatif baik, karena setiap anggaran mengalami sisa lebih satu atau surplus.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul:

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah DiKabupaten Cilacap Ditinjau Dari Aspek Keuangan Tahun Anggaran 2007-2010.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari aspek keuangan selama tahun tahun anggaran 2007-2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari aspek keuangan selama tahun anggaran 2007-2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi positif kepada pemerintah Kabupaten Cilacap tentang laporan pertanggungjawaban anggaran keuangan daerah agar lebih *accountable*, dapat dapat diterima dan dipahami publik.
2. Dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan anggaran keuangan daerah.
3. Dapat dijadikan standar penilaian kinerja dengan menggunakan konsep akuntabilitas (*accountability*).

4. Bagi penelitian selanjutnya baik dari kalangan pegawai daerah maupun dari kalangan mahasiswa yaitu sebagai landasan atau bahan informasi bagi penelitian serupa.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan teoritis tentang pengertian Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan keuangan daerah, prinsip-prinsip anggaran daerah, pengertian akuntabilitas, fungsi dan jenis akuntabilitas, pengertian analisis rasio keuangan, macam-macam rasio keuangan, tujuan analisis rasio keuangan. Serta review penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum daerah Kabupaten Cilacap, analisis data dan pembahasan yang dilakukan untuk menilai kinerja

pemerintah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari analisis rasio keuangan dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari analisis data, keterbatasan serta saran-saran yang mungkin berguna bagi pemerintah daerah dan penelitian selanjutnya.